

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI

Dalam menganalisis data – data yang terkumpul, menggunakan analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportunities, Threatment*). Konsep dasar pendekatan SWOT ini yaitu terlebih dahulu mengenal kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mengimplementasikan PLIK sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

#### 4.1. Kekuatan dan Kelemahan

Faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal penyelenggara Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dilihat dari aspek regulator. Beberapa faktor tersebut dipergunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penyelenggaraan PLIK.

- Faktor kekuatan (*strengths*) :

Identifikasi faktor yang ditujukan untuk memperkuat daya saing dan tingkat pencapaian penyelenggaraan PLIK adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan infrastruktur utama pendukung PLIK (seperti : listrik dan jalan) yang ada ada di tingkat Kecamatan lebih maju dibanding desa
- Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan relatif lebih tinggi dibanding masyarakat desa, hal ini ditandai dengan adanya fasilitas pendidikan formal setingkat pendidikan dasar dan menengah di tiap Kecamatan.
- Adanya sistem pembiayaan yang jelas dan terpadu untuk PLIK secara berkesinambungan yaitu dengan mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak melalui Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (PNPB KKPU).

- Terbentuknya kelembagaan / Satuan Kerja (Satker) yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi termasuk penyediaan PLIK yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) penuh.  
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa Mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sedangkan pengelolaan keuangannya memiliki fleksibilitas di dalam melaksanakan pengelolaan pendanaan yang berkaitan dengan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO). Satker tersebut yakni BTIP yang saat ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Telekomunikasi – Ditjen Postel Kementerian Kominfo.
  - Tarif layanan PLIK diatur oleh Peraturan Menteri Kominfo.  
Mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, maka dalam dokumen kontrak penyelenggaraan PLIK disebutkan bahwa tarif pungut maksimal untuk akses internet Rp. 2000,- /jam dengan harapan dapat dijangkau masyarakat pengguna PLIK.
  - Adanya konsep manajemen dan monitoring terhadap PLIK berupa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK)  
BTIP saat ini sedang mematangkan konsep SIMMLIK untuk memonitor kondisi jaringan, status perangkat jaringan dan lalu lintas data (trafik) di PLIK
- Faktor kelemahan (*weaknesses*):  
Beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai faktor yang memperlemah daya saing dan pencapaian tujuan penyelenggaraan PLIK adalah sebagai berikut :
    - tidak ada kajian atau penelitian tentang PLIK sebelum Program PLIK dilaksanakan.

- Lembaga yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi belum memiliki jaringan kerja nasional, mengingat Satker tersebut adalah Unit Organisasi Baru yang belum melakukan sosialisasi secara nasional sehingga belum dapat dikenal secara luas oleh masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya.
- Terbatasnya SDM ( $\pm$  33 orang) dan belum meratanya kompetensi SDM yang dimiliki BTIP sebagai Satker yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi termasuk penyediaan PLIK.

Indikator kelemahan ini dapat dilihat dari jumlah SDM di BTIP sekitar 33 orang dengan tugas pokok dan fungsi yang sedemikian besar serta komposisi SDM BTIP yang telah didominasi SDM pada tingkat pendidikan Strata 1 dan S2, namun kompetensi kurang sesuai dengan kebutuhan BTIP;

#### 4.2. Peluang dan ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi pada penyelenggaraan PLIK dari aspek demografis, aspek kemasyarakatan, aspek regulasi dan infrastruktur.

- Faktor peluang (*opportunity*):
  - Minat masyarakat untuk memanfaatkan PLIK daripada masyarakat desa.  
Masyarakat Kecamatan memiliki minat yang cukup tinggi terhadap bidang IT dibanding masyarakat desa
  - Jumlah penduduk di ibu kota kecamatan lebih banyak daripada jumlah penduduk di desa.
  - Antusiasme akan informasi yang dapat diperoleh masyarakat, terkait bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain-lain.
  - PLIK dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
  - PLIK dapat mempermudah dan memperlancar komunikasi antar masyarakat di wilayah lain dalam bentuk informasi data

- Sarana penyampaian informasi publik bagi lintas sektoral (kementerian) yang memerlukan.
- Kebijakan ITU yang mengamanahkan agar tahun 2015 seluruh negara Asia Pasific harus tersedia akses informasi

Indikator ini dapat dilihat berdasarkan kebijakan internasional di bidang telekomunikasi yang dikeluarkan oleh ITU didalam sidang WSIS pada tahun 2003 di Tokyo (*Tokyo Declaration*) kemudian dilanjutkan di Geneva ( Tahun 2003) dan di Tunisia Tahun 2005, dimana dalam deklarasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing wakil negara menetapkan bahwa tahun 2015 adalah tahun tersediannya akses informasi untuk masyarakat seluruh desa di negara Asia Pasific termasuk di dalamnya Indonesia;

- Dukungan Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah Pusat lainnya (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri) terhadap program USO telekomunikasi

Indikator ini dapat terlihat pada banyaknya usulan dari Pemerintah Daerah , dan kedua instansi Pemerintah Pusat tersebut untuk dapat dipenuhi kebutuhan akan akses informasi baik telekomunikasi maupun internet sesegera mungkin.

- Dukungan Politik yang kuat terhadap program USO telekomunikasi

Indikator ini dapat terlihat pada dicantumkannya program USO yang menjadi salah satu program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 dan Inpres No. 5 tahun 2008, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu 2010-2014 di bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi adalah tersediannya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial serta dorongan parlemen untuk segera memenuhi jasa akses telekomunikasi dan informatika di desa terpencil, perbatasan, dan daerah-daerah non komersial

- Pertumbuhan dan dinamika industri ICT

Kecenderungan perkembangan bidang telekomunikasi cukup pesat dewasa ini menyebabkan industri telekomunikasi menjadi subsektor yang strategis. Namun demikian pertumbuhan dan perkembangan telekomunikasi di Indonesia tidak diimbangi dengan pemerataan sehingga munculnya disparitas terhadap ketersediaan akses telekomunikasi. Hal ini menjadi peluang bagi BTIP untuk dapat turut mengurangi terjadinya disparitas terhadap akses telekomunikasi dimaksud.

- Faktor tantangan (*threats*) :

- Duplikasi program / penyelenggaraan PLIK dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat dan Vendor di bidang Teknologi Informasi.

Indikator ini dapat dilihat dari instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat dan Vendor di bidang Teknologi Informasi yang juga menyelenggarakan program / kegiatan seperti PLIK yaitu memenuhi akses informasi perdesaan, antara lain Balai Informasi Masyarakat (BIM) yang dibangun oleh Masyarakat Telematika (MASTEL), *Community Training and Learning Centers* (CLTC) yang dibangun oleh Microsoft Indonesia, *Information and Communication Center* ICT) yang dibangun oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Nasional, Warung Masyarakat Informatif (Warmasif) kerjasama antara Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo dengan PT. Pos dan Pemerintah Daerah yang ditunjuk, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek) oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan *Partnership for e-Prosperity for the Poor* (Pe-PP) oleh Bappenas dan United Nation Development Program (UNDP).

- Kemungkinan duplikasi pembangunan TIK khususnya layanan internet oleh Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing melalui APBD.

Indikator ini dapat dilihat dari berbagai program yang diselenggarakan oleh masing-masing pemda yang ingin membangun sendiri daerahnya melalui APBD mengingat belum terlayannya secara cepat daerah-daerah yang belum memiliki akses informasi

- Belum adanya koordinasi yang terpadu dengan internal Kementerian Kominfo maupun instansi lain untuk meningkatkan ragam konten.
- Conten atau informasi website dibuat beragam dan sesuai kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Sumber daya pengelola PLIK di Kecamatan yang beragam. Tingkat kompetensi dan jiwa wirausaha pengelola PLIK yang beragam dapat mempengaruhi keberlangsungan program PLIK.
- Pemanfaatan PLIK oleh masyarakat. Belum diketahui seberapa minat masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan PLIK, padahal salah satu tolok ukur keberhasilan program pemerintah dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat.
- Belum adanya mekanisme pengaduan dari masyarakat bila terjadi gagal fungsi (error) ataupun kerusakan yang dialami pengguna saat menggunakan komputer PLIK.
- Keterbatasan sumber daya alamat Internet Protocol versi 4 (IPv4) Menurut hasil analisa para ahli diperkirakan habisnya persediaan pool alamat IPv4 di level IANA (Lembaga pengelola sumberdaya Internet dunia) paling lama pada tahun 2012 yaitu tinggal 7% atau 280 Juta alamat saja yang tersisa untuk alokasi ke seluruh dunia.

### **4.3 Analisa Strategi dengan Pendekatan SWOT**

Posisi kuadran untuk strategi SWOT dapat dihitung menggunakan kombinasi rating dan bobot, dengan mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui kuesioner dengan target adalah pengambil kebijakan / pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, kemudian dilakukan perhitungan pembobotan berdasarkan hasil pengisian kuesioner untuk kemudian dilakukan

analisa lebih lanjut. Masing-masing responden bebas untuk memasukkan rating dan bobot sesuai dengan pendapatnya untuk setiap atribut dimensi.

#### Pembobotan

Pembobotan faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang didasarkan besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan implementasi PLIK dilakukan dengan kriteria pembobotan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Model Bobot SWOT

STS	Sangat tidak setuju jika isu tidak relevan dengan kondisi saat ini
TS	Tidak setuju jika isu jika isu tidak relevan dengan kondisi saat ini
R	Ragu-ragu jika isu tidak dapat dijustifikasi
S	Setuju jika isu relevan dengan kondisi saat ini
SS	Sangat Setuju jika isu relevan dengan kondisi saat ini

Karena jumlah bobot harus sama dengan 1.00 untuk setiap matriks evaluasi, maka rating untuk setiap responden tidak mesti sama, tergantung dari banyak jumlah variabel yang dipilih, atau dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$A (SS) + B (S) + C (R) + D (TS) + E (STS) = 1.00 \quad (3.1)$$

Dimana :

A = jumlah banyaknya SS dalam satu matrik evaluasi

B = jumlah banyaknya S dalam satu matrik evaluasi

C = jumlah banyaknya R dalam satu matrik evaluasi

D = jumlah banyaknya TS dalam satu matrik evaluasi

E = jumlah banyaknya STS dalam satu matrik evaluasi

SS = bobot nilai Sangat Setuju

S = bobot nilai Setuju

R = bobot nilai Ragu-ragu

TS = bobot nilai Tidak Setuju

STS = bobot nilai Sangat Tidak Setuju

Agar Lebih Mudah maka nilai rasio perbandingan antara SS hingga STS, dibuat sama dengan 2, sehingga :

$$SS : S : R : TS : STS = 1 : 2 : 4 : 8 : 16$$

(3.2)

Jika  $SS = X$ , maka :

$$S = 1/2 X \quad (3.3)$$

$$R = 1/4 X \quad (3.4)$$

$$TS = 1/8 X \quad (3.5)$$

$$STS = 1/16 X \quad (3.6)$$

Sehingga :

$$A (1X) + B (1/2 X) + C (1/4 X) + D (1/8 X) + E (1/16 X) = 1.00$$

$$X = 16 / (16A + 8B + 4C + 2D + E) \quad (3.7)$$

$$X = SS \quad (3.8)$$

Rating

Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang tersebut di atas dilakukan dengan skala/rating dan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.2 Model rating SWOT

1	Isu yang disampaikan sangat tidak penting
2	Isu yang disampaikan tidak penting
3	Isu yang disampaikan penting
4	Isu yang disampaikan sangat penting

Masing-masing responden bebas untuk memasukkan rating sesuai dengan pendapatnya untuk setiap atribut dimensi. Setelah didapatkan nilai rating dan bobot, maka total nilai untuk masing-masing dimensi dihitung berdasarkan formulasi berikut :



$$\text{Nilai}_{(\text{kekuatan-kelemahan})} = \sum (\text{rating } (S_n) \times \text{bobot } (S_n)) + \sum (\text{rating } (W_n) \times \text{bobot } (W_n))$$

.. (3.9)

$$\text{Nilai}_{(\text{peluang-tantangan})} = \sum (\text{rating } (O_n) \times \text{bobot } (O_n)) + \sum (\text{rating } (P_n) \times \text{bobot } (P_n))$$

.....(3.10)

Setelah melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data hasil questioner berdasarkan bobot dan rating diperoleh nilai akhir kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman dari penyelenggaraan PLIK. Selanjutnya analisis SWOT menggunakan Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS), yaitu

Tabel 4.3 Matrik Evaluasi Internal

Faktor Dimensi Internal		Rating	Bobot	Total
<b>Kekuatan (S)</b>				
S1	Ketersediaan infrastruktur utama pendukung PLIK (seperti : listrik dan jalan) yang ada ada di tingkat Kecamatan lebih maju dibanding desa	3,3	0,125	0,4132
S2	Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan relatif lebih tinggi dibanding masyarakat desa, hal ini ditandai dengan adanya fasilitas pendidikan formal setingkat pendidikan dasar dan menengah di tiap Kecamatan	3,1	0,122	0,3794
S3	Sistem pembiayaan yang jelas dan terpadu untuk PLIK secara berkesinambungan yaitu dengan mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak melalui Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (PNPB KKPU)	3,4	0,111	0,3788
S4	Terbentuknya kelembagaan / Satuan Kerja (Satker) yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi termasuk penyediaan PLIK yang sudah berstatus Badan Layanan Umum	3,5	0,114	0,3990

	(BLU) penuh			
S5	Tarif layanan PLIK relatif terjangkau oleh masyarakat Kecamatan (dalam dokumen kontrak penyelenggaraan PLIK disebutkan bahwa tarif pungut maksimal untuk akses internet Rp. 2000/jam)	3,5	0,106	0,3700
S6	Adanya konsep manajemen dan monitoring terhadap PLIK berupa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK)	3,7	0,120	0,4425
<b>Total</b>				<b>2,3828</b>

Faktor Dimensi Internal		Rating	Bobot	Total
<b>Kelemahan (W)</b>				
W1	Belum ada kajian atau penelitian tentang PLIK sebelum Program PLIK dilaksanakan	3,3	0,092	0,3046
W2	Lembaga yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi belum memiliki jaringan kerja nasional, mengingat Satker tersebut adalah Unit Organsiasi Baru yang belum melakukan sosialisasi secara nasional sehingga belum dapat dikenal secara luas oleh masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya	3,4	0,106	0,3597
W3	Terbatasnya SDM ( $\pm$ 33 orang) dan belum meratanya kompetensi SDM yang dimiliki BTIP sebagai Satker yang menangani khusus KPU/USO Telekomunikasi termasuk penyediaan PLIK	3,2	0,103	0,3299
<b>Total</b>				<b>0,9942</b>

Tabel 4.4 Matrik Evaluasi Eksternal

Faktor Dimensi Eksternal		Rating	Bobot	Total
<b>Peluang (O)</b>				
O1	Minat masyarakat Kecamatan lebih tinggi untuk memanfaatkan PLIK daripada masyarakat desa	3,3	0,055	0,1800
O2	Jumlah penduduk di ibu kota kecamatan lebih banyak daripada jumlah penduduk di desa	2,9	0,056	0,1622
O3	Antusiasime akan informasi yang dapat diperoleh masyarakat, terkait bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan dal lain-lain.	3,3	0,056	0,1846
O4	PLIK dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum	3,3	0,059	0,1936
O5	PLIK dapat mempermudah dan memperlancar komunikasi antar masyarakat di wilayah lain dalam bentuk informasi data	3,4	0,061	0,2088
O6	Sarana penyampaian informasi publik bagi lintas sektoral (kementerian) terkait yang memerlukan	3,4	0,059	0,1995
O7	Kebijakan ITU yang mengamanahkan agar tahun 2015 seluruh negara Asia Pasific harus tersedia akses informasi	3,3	0,056	0,1846
O8	Dukungan Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah Pusat lainnya (Kementrian PDT dan Kementerian Dalam Negeri) terhadap program USO telekomunikasi	3,7	0,064	0,2374
O9	Dukungan Politik yang kuat terhadap program USO telekomunikasi (salah satu program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 dan Inpres No. 5 tahun 2008, Rencana Strategis Kementerian Kominfo	3,7	0,061	0,2273
O10	Pertumbuhan dan dinamika industri ICT	3,5	0,064	0,2246
<b>Total</b>				<b>2,0026</b>

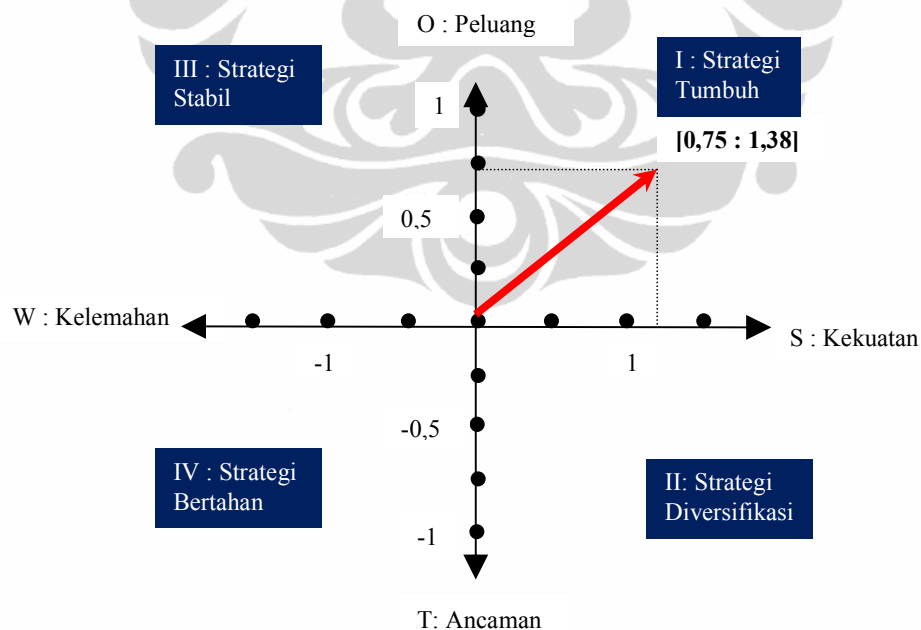
Faktor Dimensi Eksternal		Rating	Bobot	Total
<b>Ancaman (T)</b>				
T1	Duplikasi program / penyelenggaraan PLIK dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat dan Vendor di bidang Teknologi Informasi	2,8	0,046	0,1296
T2	Kemungkinan duplikasi pembangunan TIK khususnya layanan internet oleh Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing melalui APBD	2,6	0,046	0,1204
T3	Belum adanya koordinasi yang terpadu dengan internal Kementerian Kominfo maupun instansi lain untuk meningkatkan ragam konten	3,3	0,055	0,1800
T4	Konten atau informasi website yang dibuat kurang sesuai kebutuhan masyarakat serta adanya kemungkinan konten yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku	3,2	0,055	0,1746
T5	Sumber daya pengelola PLIK di Kecamatan yang beragam	3,4	0,049	0,1668
T6	Belum diketahui seberapa minat masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan PLIK	3,2	0,053	0,1702
T7	Belum adanya mekanisme pengaduan dari masyarakat bila terjadi gagal fungsi (error) ataupun kerusakan yang dialami pengguna saat menggunakan komputer PLIK	3,1	0,052	0,1606
T8	Keterbatasan sumber daya alamat Internet Protocol versi 4 (IPv4)	2,8	0,053	0,1489
<b>Total</b>				<b>1,2510</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data pada matriks evaluasi internal dan matriks evaluasi eksternal didapatkan besaran nilai dari masing-masing matriks tersebut, yang kemudian menjadi masukan untuk analisa kuadran.

$$\begin{aligned}\text{Nilai Matriks Evaluasi Internal} &= \text{Total Kekuatan} - \text{Total Kelemahan} \\ &= 2,3828 - 0,9942 \\ &= 1,3886\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Matriks Evaluasi Eksternal} &= \text{Total Peluang} - \text{Total Ancaman} \\ &= 2,0026 - 1,2510 \\ &= 0,7516\end{aligned}$$

Posisi Penyelenggaraan Pusat Internet Kecamatan (PLIK) dalam wilayah **Kuadran I (bertumbuh)**. Posisi ini menggambarkan bahwa strategi bertumbuh untuk Implementasi PLIK sangat dimungkinkan karena kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman. Posisi koordinat kuadran Penyelenggaraan PLIK disajikan dalam diagram berikut :



Gambar 4.1 Hasil Analisa Kuadran

Selanjutnya akan dibuat matriks SWOT untuk penyelenggaraan PLIK untuk menghasikan alternatif strategi yang layak, seperti pada tabel matrik berikut.

Tabel 4.5 Matrik SWOT untuk Penyelenggaraan PLIK

	Kekuatan (Strengths – S)	Kelemahan (Weakness - W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan infrastruktur pendukung PLIK</li> <li>2. Tingkat pendidikan lebih tinggi</li> <li>3. Sistem pembiayaan yang jelas dan terpadu</li> <li>4. Terbentuknya kelembagaan khusus</li> <li>5. Tarif layanan relatif terjangkau</li> <li>6. Adanya konsep manajemen dan monitoring</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada kajian atau penelitian tentang PLIK</li> <li>2. Belum memiliki jaringan kerja nasional</li> <li>3. Terbatasnya SDM dan belum meratanya kompetensi</li> </ol>
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat masyarakat tinggi</li> <li>2. Jumlah penduduk lebih banyak</li> <li>3. Antusiasme masyarakat</li> <li>4. PLIK berdampak pada peningkatan kesejahteraan</li> <li>5. PLIK dapat mempermudah kelancaran komunikasi</li> <li>6. Sarana penyampaian informasi publik bagi lintas sektorat</li> <li>7. Kebijakan ITU : harus tersedia akses informasi</li> <li>8. Dukungan Pemda dan instansi pemerintah pusat lainnya</li> </ol>	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merealisasikan SIMPLIK dan koneksi internet (S6,O5, O6, O7)</li> <li>2. Melakukan evaluasi langsung ke lapangan secara berkala dan berkelanjutan (S4,S6,O4,O5)</li> <li>3. Menekankan metode pemeliharaan, dan penerapan target penyelesaian gangguan (S1,S6,O7)</li> <li>4. Selektif melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan menjadi pengelola PLIK (S2,O1,O3,O8)</li> <li>5. Dapat memenuhi kebutuhan daya listrik pada lokasi PLIK (S1,O5,O6)</li> <li>6. Mengutamakan</li> </ol>	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Dewan Redaksi untuk mengatur distribusi informasi yang anggotanya dapat terdiri dari lintas sektoral (W2,W3, O8)</li> <li>2. Melakukan transfer knowledge, pelatihan, peningkatan kualitas pendidikan SDM, baik untuk SDM internal BTIP maupun eksternal (W3, O5)</li> <li>3.</li> </ol>

<p>9. Dukungan politik yang kuat</p> <p>10. Pertumbuhan dan dinamika industri ICT</p>	<p>perangkat dan pembelanjaan dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan industri TIK (S3, O10)</p> <p>7. Dengan sumber keuangan yang cukup dan keleluasaan penggunaan anggaran, mewujudkan dorongan politik untuk memenuhi ketersediaan akses telekomunikasi dan informatika (S3,S4, O7,O8,O9)</p>	
<p>Ancaman (Threats-T)</p> <p>1. Duplikasi penyelenggaraan PLIK</p> <p>2. Kemungkinan duplikasi pembangunan TIK oleh pemda</p> <p>3. Belum adanya koordinasi yang terpadu</p> <p>4. Konten kurang sesuai serta bertentangan</p> <p>5. Sumber daya pengelola PLIK beragam</p> <p>6. Belum diketahui minat masyarakat</p> <p>7. Belum adanya mekanisme pengaduan</p> <p>8. Keterbatasan sumber daya alamat IPv4</p>	<p>Strategi ST :</p> <p>1. Untuk materi konten, bekerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan untuk penyebaran informasi publik (S2, T3,T4)</p> <p>2. Terkait mekanisme pengaduan bila terjadi error, hendaknya sudah diakomodir fungsi helpdesk SIMMPLIK pada kemampuan monitoring SIMPLIK (S6,T7)</p> <p>3. Perlu segera diatur regulasi terkait dengan rencana penggunaan dan migrasi IP ver.6 (S1,T8)</p>	<p>Strategi WT :</p> <p>1. Melakukan kajian kompherensif melalui survey ke wilayah PLIK untuk mengetahui minat dan kesiapan masyarakat kecamatan (W1,T6)</p> <p>2. Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait yang mengembangkan TIK dengan membentuk jaringan kerja tingkat masional (W2,T2,T3)</p>

Untuk menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan, maka akan dibuat Matrik Internal – Eksternal (IE Matrik ). Matriks IE didasarkan pada dua dimensi yaitu total faktor strategis internal pada sumbu x dan total faktor strategi eksternal pada sumbu y, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Faktor Strategis Internal

Faktor Strategis Internal		Rating	Bobot	Skor
<b>Kekuatan (S)</b>				
S1	Ketersediaan infrastruktur pendukung PLIK	3,3	0,125	0,4132
S2	Tingkat pendidikan lebih tinggi	3,1	0,122	0,3794
S3	Sistem pembiayaan yang jelas dan terpadu	3,4	0,111	0,3788
S4	Terbentuknya kelembagaan khusus	3,5	0,114	0,3990
S5	Tarif layanan relatif terjangkau	3,5	0,106	0,3700
S6	Adanya konsep manajemen dan monitoring	3,7	0,120	0,4425
<b>Kelemahan (W)</b>				
W1	Belum ada kajian atau penelitian tentang PLIK	3,3	0,092	0,3046
W2	Belum memiliki jaringan kerja nasional	3,4	0,106	0,3597
W3	Terbatasnya SDM dan belum meratanya kompetensi	3,2	0,103	0,3299
<b>Total</b>			1,000	<b>3,37706</b>

Tabel 4.7 Faktor Strategis Eksternal

Faktor Strategis Eksternal		Rating	Bobot	Total
<b>Peluang (O)</b>				
O1	Minat masyarakat tinggi	3,3	0,055	0,1800
O2	Jumlah penduduk lebih banyak.	2,9	0,056	0,1622
O3	Antusiasime masyarakat.	3,3	0,056	0,1846
O4	PLIK berdampak peningkatan kesejahteraan	3,3	0,059	0,1936
O5	PLIK dapat mempermudah lancar komunikasi.	3,4	0,061	0,2088
O6	Sarana penyampaian informasi publik bagi lintas sektoral	3,4	0,059	0,1995
O7	Kebijakan ITU harus tersedia akses informasi	3,3	0,056	0,1846
O8	Dukungan Pemda dan instansi Pemerintah Pusat	3,7	0,064	0,2374
O9	Dukungan Politik yang kuat	3,7	0,061	0,2273
O10	Pertumbuhan dan dinamika industri ICT	3,5	0,064	0,2246



<b>Ancaman (T)</b>				
T1	Duplikasi penyelenggaraan PLIK	2,8	0,046	0,1296
T2	Kemungkinan duplikasi pembangunan TIK oleh Pemerintah Daerah	2,6	0,046	0,1204
T3	Belum adanya koordinasi yang terpadu	3,3	0,055	0,1800
T4	Konten kurang sesuai serta bertentangan	3,2	0,055	0,1746
T5	Sumber daya pengelola PLIK beragam	3,4	0,049	0,1668
T6	Belum diketahui minat masyarakat	3,2	0,053	0,1702
T7	Belum adanya mekanisme pengaduan	3,1	0,052	0,1606
T8	Keterbatasan sumber daya alamat IPv4	2,8	0,053	0,1489
<b>Total</b>			<b>1.000</b>	<b>3,2536</b>

Setelah didapatkan total Skor Faktor Strategis Internal yaitu 3,37706 dan total skor Faktor Strategis Eksternal yaitu 3,2536, selanjutnya akan dipetakan ke dalam Tabel Matrik Internal – Eksternal.

Pada sumbu x dari matriks faktor strategis internal, total skor faktor strategis internal dari 1 hingga 1,99 dianggap rendah/lemah, nilai dari 2 hingga 2,99 adalah menengah, dan nilai dari 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi, dan begitu pula dengan sumbu y dari matriks faktor strategis eksternal. Pemetaan dari total skor yang diperoleh sebelumnya untuk internal dan eksternal, diindikasikan pada titik dalam sel I, seperti pada matriks berikut :

Tabel 4.8 Matrik Internal – Eksternal (*IE Matrik*)

Total Skor Faktor Strategis Internal

		4,0	KUAT	3,0	RATA-RATA	2,0	LEMAH	1,0
Total Skor Faktor Strategis Eksternal	TINGGI		I		II		III	
	3,0		tumbuh dan kembangkan		tumbuh dan kembangkan		Jaga dan pertahankan	
		IV		V		VI		
		tumbuh dan kembangkan		Jaga dan pertahankan		Tuai atau divestasikan		
	2,0		VII		VIII		IX	
RENDAH		Jaga dan pertahankan		Tuai atau divestasikan		Tuai atau divestasikan		

Keterangan :

Matriks IE dibagi menjadi 3 daerah utama yang memiliki implikasi strategi berbeda, yaitu :

- a. Untuk sel I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan. Strategi yang paling sesuai adalah strategi intensif, dapat berupa :
  - penetrasi pasar : meningkatkan pangsa pasar untuk produk saat ini dipasar melalui upaya pemasaran yang lebih besar,
  - pengembangan pasar : memperkenalkan produk/jasa saat ini ke area geografis baru
  - pengembangan produk : meningkatkan penjualan melalui perbaikan produk /jasa saat ini atau mengembangkan produk/jasa baru
  - integrasi ke belakang : mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan,
  - integrasi ke depan : mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau pengecer
  - integrasi horizontal : mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing.
- b. Untuk sel III, V atau VII, dapat dikelola dengan strategi jaga dan pertahankan. Strategi umum yang digunakan adalah penetrasi pasar, dan pengembangan produk
- c. Untuk sel VI, VIII dan IX, strategi yang digunakan adalah divestasi yakni menjual satu divisi atau bagian perusahaan

Setelah dipetakan pada matrik diatas, terlihat bahwa total skor untuk faktor strategi internal berada di posisi kuat, sedangkan untuk faktor strategi eksternal berada di posisi tinggi, sehingga berada di sel I yaitu pada kondisi tumbuh dan kembangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penyelenggaraan PLIK ini memiliki posisi kompetitif yang kuat dan berdaya tarik tinggi, sehingga harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Strategi yang sesuai untuk digunakan dapat berupa strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan produk/layanan atau integratif (integrasi ke depan dan integrasi ke belakang)

#### **4.4 Analisa Strategi Implementasi Penyelenggaraan PLIK**

Dari hasil analisis dengan pendekatan SWOT diatas, dihasilkan bahwa posisi penyelenggaraan PLIK berada di kuadran I yaitu menggunakan strategi *growth* (bertumbuh). Dari beberapa jenis strategi *growth*, untuk mendapatkan strategi yang cocok, maka dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Internal-Eksternal Matriks, dan hasilnya posisi PLIK berada di daerah sel I yaitu dengan strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan produk/layanan atau integratif.

Beberapa strategi yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam implementasi PLIK berdasarkan pendekatan SWOT maupun analisis Internal-Eksternal Matriks, sebagai berikut :

- 1) Untuk mendukung penyelenggaraan dan dalam rangka pengembangan PLIK, maka BTIP perlu segera merealisasikan SIMMPLIK sebagai pusat manajemen dan monitoring serta menyelenggarakan koneksi internet antara SIMMPLIK dan PLIK. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kualitas layanan, termasuk mekanisme pengaduan bila terjadi kerusakan serta dapat mendistribusikan konten yang diperlukan
- 2) Selain menggunakan metode manajemen monitoring melalui SIMMLIK, BTIP perlu lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengecek kesesuaian aspek teknis, kualitas layanan serta pola kemitraan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak. Hal ini juga sebagai strategi integrasi ke belakang yakni meningkatkan kontrol atas penyelenggara layanan PLIK. Selain itu,

penyelenggara PLIK agar lebih menekankan metode pemeliharaan dan penerapan target penyelesaian gangguan sesuai dengan kondisi geografi .

- 3) Untuk menunjang keberlangsungan PLIK, Penyelenggara PLIK harus selektif dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan dijadikan sebagai pengelola PLIK yang didukung kemampuan manajemen pengelolaan dan pengoperasian PLIK. Hal ini mendukung strategi integrasi ke depan yaitu dalam rangka meningkatkan kontrol atas pengelola PLIK
- 4) Meskipun ketersediaan infrastruktur di Kecamatan relatif lebih baik dibanding di desa, Penyelenggara PLIK harus dapat memenuhi kebutuhan daya listrik perangkat yang akan ditempatkan pada lokasi PLIK, termasuk penggunaan generator dan atau *Uninterrupt Power System* (UPS) yang sanggup memberikan daya listrik cadangan secara temporer bila supply daya listrik dari PLN atau non-PLN sedang mengalami gangguan atau padam. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan layanan serta mengakomodir minat dan antusiasime masyarakat
- 5) Untuk meningkatkan penggunaan PLIK dalam rangka peningkatan penetrasi pasar, perlu dilakukan sosialisasi rutin dan berkesinambungan kepada masyarakat kecamatan tentang manfaat internet maupun dampak PLIK yang dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain beberapa prioritas strategi di atas, dapat dibuat beberapa kemungkinan alternatif strategi untuk mendukung implementasi PLIK, sebagai berikut :

- 1) Untuk materi konten, BTIP dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya yang berkepentingan untuk mendukung informasi produktif, penyebaran informasi publik, pemberdayaan potensi dan masyarakat daerah di WPUT Internet Kecamatan dengan memperhatikan isi informasi yang sehat dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam Pengelolaan konten BTIP berkoordinasi dengan pihak terkait (contoh pengelola detik.com) yang sudah biasa berkecimpung dalam pengadaan dan pengelolaan konten untuk mendapatkan masukan mengenai konten ideal yang dapat didistribusikan oleh SIMMLIK.

- 3) Perlu dibentuk semacam Dewan Redaksi, yang bertugas mengatur distribusi informasi dimana anggotanya dapat terdiri dari lintas sektoral yaitu Kominfo, Hankam, Diknas, Pertanian, Kesehatan, Perdagangan dll, lembaga penyiaran, dewan pers dan komunitas di bidang TIK. Dewan Redaksi tersebut memiliki kewenangan untuk memberi peringatan atau menghentikan distribusi suatu informasi, baik sementara maupun permanen jika ada indikasi pelanggaran UU ITE, menghentikan kerjasama dengan penyelenggara konten jika ada indikasi pelanggaran UU ITE dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- 4) Melakukan kajian komprehensif melalui survey ke seluruh wilayah PLIK untuk mengetahui minat, kesiapan dan kebutuhan konten dari masyarakat.
- 5) Melakukan transfer knowledge dari tenaga-tenaga ahli, mengadakan pelatihan, peningkatan kualitas pendidikan kepada SDM BTIP dalam rangka pemerataan kompetensi SDM dan dilakukan penataan kembali organisasi (restrukturisasi organisasi) dan pelatihan kepada SDM Pengelola PLIK mengenai manajemen pengelolaan dan pengoperasian PLIK.
- 6) Melakukan sosialisasi secara rutin sekaligus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak instansi terkait yang mengembangkan TIK di daerah di dalam rangka meminimalisasi duplikasi kegiatan, sekaligus mendorong terjadinya pembentukan jaringan koordinasi tingkat nasional.
- 7) Memperhatikan isu bahwa slot pengalamatan perangkat jaringan menggunakan IP ver.4 tersisa hanya 7% untuk seluruh dunia dan pada tahun 2012 IP ver.4 akan habis digunakan, maka Penyediaan Jasa Akses Internet Kecamatan dalam hal ini SIMMLIK hendaknya dapat mengantisipasi rancangan arsitektur dan kemampuan teknis mekanisme migrasi dari IP ver.4 ke IP ver.6. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur regulasi terkait dengan rencana penggunaan dan migrasi IP ver.6.
- 8) Mengingat sumber pembiayaan berasal dari PNBPN maka penyelenggara PLIK harus selektif dalam melakukan kemitraan dengan sub kontraktor dan penyedia perangkat (vendor) dalam negeri dan mengutamakan pembelian dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan dan industri TIK.